

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KB KABUPATEN
SIDOARJO**

TAHUN 2021-2026



**DINAS P3AKB KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2022**

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 selesai disusun. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sidoarjo Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.

Perubahan Renstra ini dilatar belakangi oleh keberadaan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Dalam Perubahan Renstra ini, selain memuat Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator sebagai upaya menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, masukan dan saran dengan demikian sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen ini. Harapannya keberadaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, Maret 2022
KEPALA DINAS P3AKB
KABUPATEN SIDOARJO

AINUN AMALIA, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP 19750513 199311 2 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Diagram	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud	8
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo	11
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo	18
2.2.1 Sumber Daya Manusia	18
2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo	32
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo	35
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur	40
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian	40
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	45
3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	51

BAB 5	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	58
BAB 6	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	64
BAB 7	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
BAB 8	PENUTUP	94

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021	18
Tabel 2.2	Proporsi Pegawai ASN Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	21
Tabel 2.3	Proporsi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jabatan Tahun 2021	23
Tabel 2.4	Proporsi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	24
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021	25
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020	26
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020	28
Tabel 3.1	Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah Dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo	36
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Renstra BKKBN Pusat	43
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur	44
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Renstra BKKBN Provinsi Jawa Timur	44
Tabel 3.7	Rumusan Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	48
Tabel 3.8	Penetapan Isu-Isu Strategis	48
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	56
Tabel 5.1	Linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo	62

Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo	65
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	92

Daftar Diagram

Diagram 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Daerah	4
Diagram 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo	17
Diagram 2.2	Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Menurut Status Kepegawaian Tahun 2021	19
Diagram 2.3	Komposisi Pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo dengan ASN Penyuluh KB Tahun 2021	19
Diagram 2.4	Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	20
Diagram 2.5	Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian Tahun 2021	21
Diagram 2.6	Komposisi Pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Menurut Golongan Tahun 2021	22
Diagram 2.7	Komposisi Pegawai ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Menurut Golongan Tahun 2021	22
Diagram 2.8	Komposisi Pegawai ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Jabatan Tahun 2021	24
Diagram 2.9	Persentase Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021	25
Diagram 5.2	Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	60

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya urusan konkuren yang diserahkan ke daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan sebagian Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi kewenangan daerah. Amanah tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan kedua Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar tersebut dilaksanakan melalui dua kebijakan besar. *Pertama*, untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui Pembangunan Responsif Gender yang bertujuan mewujudkan kesetaraan gender di semua sektor pembangunan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan menjadi dasar pelaksanaan Pembangunan Responsif Gender di Kabupaten Sidoarjo.

Kinerja Pembangunan Responsif Gender di Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun terakhir terlihat cukup mengembirakan. Menurut data yang dirilis BPS Provinsi Jawa Timur, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 93,33 pada tahun 2017 menjadi 94,26 pada tahun 2021 (<https://jatim.bps.go.id/indicator/40/176/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>, akses 10 Maret 2022). Adapun capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga mengalami peningkatan dari 64,65 pada tahun 2017 menjadi 67,20 pada tahun 2020 (<https://jatim.bps.go.id/indicator/40/177/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>, akses 10 Maret 2022). Meskipun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, capaian IDG Kabupaten Sidoarjo masih jauh berada di bawah capaian IPG. Kondisi ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pemberdayaan

perempuan masih menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kesenjangan perempuan dan laki-laki masih cukup lebar terkait dengan porsi perempuan dalam keterwakilan perempuan di parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan.

Perlindungan Anak ditujukan untuk Pemenuhan Hak Anak (PUHA) seluruh anak di Kabupaten Sidoarjo mulai dari dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun. Anak merupakan masa depan bangsa sebab itu anak-anak harus dipenuhi hak-haknya dan dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan anak selalu berkembang seiring perkembangan jaman yang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat yang saling mendukung dan sinergis. Dalam rangka mewujudkan tanggungjawab tersebut Provinsi dan Kabupaten/Kota didorong menjadi Provinsi/Kabupaten/Kota layak Anak dengan pemenuhan 24 Indikator Perlindungan Anak. Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 mampu mempertahankan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak dengan kategori Nindya (<https://www.harianbhirawa.co.id/sidoarjo-mempertahankan-kota-layak-anak-kategori-nindya/>, akses 10 Maret 2022).

Kedua, kebijakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. Tujuan pengendalian penduduk adalah untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumberdaya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.

Upaya pengaturan kelahiran di Kabupaten Sidoarjo melalui keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program KB relatif cukup bagus. Meskipun demikian masih diperlukan berbagai upaya keras sebab berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo, capaian Persentase PUS yang ikut KB cenderung berfluktuasi. Capaian pada tahun 2020 sebesar 79% tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 83,61%.

Adapun kinerja pada upaya pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari kinerja dalam lima tahun terakhir yang terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2016 capaian persentase pendewasaan usia perkawinan hanya 0,46% maka pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,69%. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

tidak boleh terlalu berpuas diri, mengingat tantangan di masa mendatang jauh lebih berat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB. OPD ini memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan keberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan pembangunan kependudukan melalui penyelenggaraan KB di Kabupaten Sidoarjo.

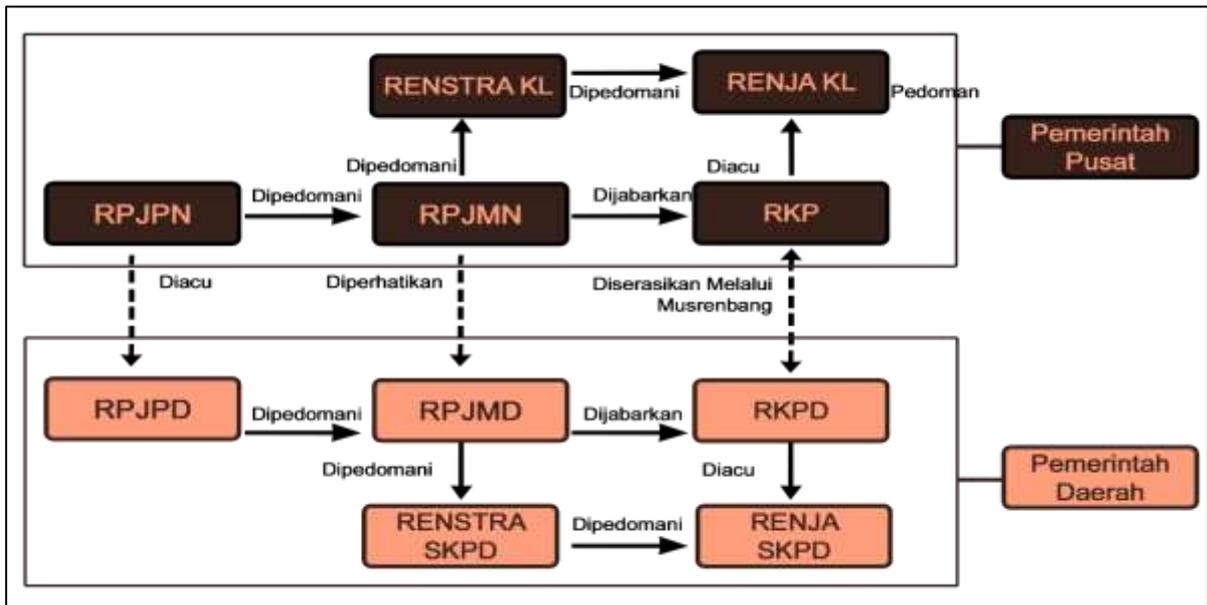
Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2021-2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka D Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 sebagai acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo untuk lima tahun mendatang.

Dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sidoarjo

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Diagram 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Daerah



Proses penyusunan Renstra mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana dalam penyusunannya harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Politis, dan Pendekatan Atas Bawah (*Top-Down*) dan Bawah Atas (*Bottom-Up*). *Pertama*, Pendekatan Teknokratik. Secara praktis pendekatan teknokratik disusun lebih dengan pendekatan akademis dan ilmiah, sebagai upaya dalam melihat objektivitas kondisi, permasalahan, dan isu-isu strategis di lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kedua, Pendekatan Partisipatif. Segala proses dan tahapan dalam penyusunan Renstra dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* terkait. Implementasi pendekatan partisipatif dalam penyusunan Renstra direpresentasikan melalui penjangkaran aspirasi dari *stakeholder* meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Akademisi, dan pihak lain yang terkait.

Ketiga, Pendekatan Politis. Renstra merupakan dokumen penerjemahan Visi dan Misi dan Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Substansi pendekatan ini adalah untuk memastikan berbagai target pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mendapat dukungan anggaran dan kebijakan yang tepat agar target pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam renstra dapat tercapai.

Keeempat, Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*. Pada pendekatan *Bottom-Up* berbagai usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan yang terkait urusan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra. Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara priodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

Keberadaan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disahkan pada tanggal 27 Desember 2021 menuntut adanya penyesuaian dalam dokumen perencanaan pembangunan di daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo. Menindaklanjuti pemberlakuan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/2003/438.6.1/2022 yang memerintahkan OPD melakukan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Salah satu substansi perubahan Renstra adalah mengakomodir indikator dan satuan indikator Sub Kegiatan sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 ke dalam dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan Perubahan Renstra yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Melalui Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih lima tahun mendatang. Memperhatikan uraian latar belakang di atas, maka penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo menjadi penting untuk dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
28. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ke dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo;
2. Menjabarkan Visi-Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program Kerja Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo;
3. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo;
4. Memberikan gambaran kinerja pelayanan, mengetahui kelemahan, kekuatan, tantangan dan peluang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

KB Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas, serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang
1. 2 Landasan Hukum
1. 3 Maksud dan Tujuan
1. 4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB KABUPATEN SIDOARJO

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo
2. 2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo
2. 3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo
2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB KABUPATEN SIDOARJO

3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo

3. 2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. 3 Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
3. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3. 5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, Perangkat Daerah ini merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan

penyelenggaraan kegiatan Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Kepala Dinas juga memiliki kewenangan menandatangani rekomendasi/persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan dinas, yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses penerbitan perizinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas didukung oleh beberapa unsur yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendali Intern Pemerintahan (SPIP), Zona Integritas, dan akuntabilitas pada Dinas;
- e. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan keuangan meliputi:
 1. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 2. Pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
 3. Pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran; dan
 4. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- f. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan perencanaan dan pelaporan, meliputi:
 1. Penyusunan program kerja dinas;
 2. Pengoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas;
 3. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran;

4. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah;
5. Penyusunan laporan kinerja dinas; dan
6. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan;
- g. Pelaporan kinerja Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

📁 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
- c. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Menerima dan mengoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi/website Dinas;
- f. Melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. Melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan Program Pengarustamaan Gender, Program Pemberdayaan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak serta Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga meliputi :

1. Menyusun perumusan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
 3. Menyusun dan memperbarui data kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga; dan
 5. Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengoordinasikan kebutuhan data pada Bidang;
- d. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Pemenuhan Hak Anak meliputi:
1. Menyusun perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
 3. Menyusun dan memperbarui data pemenuhan hak anak; dan
 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
- e. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak meliputi:
1. Perempuan dan perlindungan khusus anak;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
 3. Menyusun dan memperbarui data perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak; dan
 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Pelaporan kinerja Bidang; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

C. Bidang Pengendalian Penduduk, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Pengendalian Penduduk. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian penduduk;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk;
- c. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Pengolahan Data Perkembangan Penduduk meliputi:

1. Menyusun rumusan kebijakan teknis pengolahan data perkembangan penduduk;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis pengolahan data perkembangan penduduk;
 3. Menyusun dan memperbarui data, serta pengolahan data perkembangan penduduk;
 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pengolahan data perkembangan penduduk; dan
 5. Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengoordinasikan kebutuhan data pada Bidang;
- d. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Kebijakan dan Monitoring Evaluasi meliputi :
1. Menyusun perumusan kebijakan teknis kebijakan dan monitoring evaluasi;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis kebijakan dan monitoring evaluasi;
 3. Menyusun dan memperbarui data kebijakan dan monitoring evaluasi; dan
 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis kebijakan dan monitoring evaluasi;
- e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk;
- f. Pelaporan kinerja Bidang; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

D. Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis keluarga berencana dan ketahanan keluarga;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis keluarga berencana dan ketahanan keluarga;
- c. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Keluarga Berencana meliputi:
 1. Menyusun perumusan kebijakan teknis keluarga berencana;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis keluarga berencana;
 3. Menyusun dan memperbarui data keluarga berencana; dan
 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis keluarga berencana;

- d. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Ketahanan Keluarga dan Peran Serta Masyarakat meliputi :
 - 1. Menyusun perumusan kebijakan teknis ketahanan keluarga dan peran serta masyarakat;
 - 2. Melaksanakan kebijakan teknis ketahanan keluarga dan peran serta masyarakat;
 - 3. Menyusun dan memperbarui data kebijakan teknis ketahanan keluarga dan peran serta masyarakat; dan
 - 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis ketahanan keluarga dan peran serta masyarakat;
- e. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi meliputi :
 - 1. Menyusun perumusan kebijakan teknis Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);
 - 2. Melaksanakan kebijakan teknis Advokasi dan KIE;
 - 3. Menyusun dan memperbarui data Advokasi dan KIE;
 - 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis Advokasi dan KIE; dan
 - 5. Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengoordinasikan kebutuhan data pada Bidang
- f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis keluarga berencana dan ketahanan keluarga;
- g. Pelaporan kinerja Bidang; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

E. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau penunjang tertentu. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya;

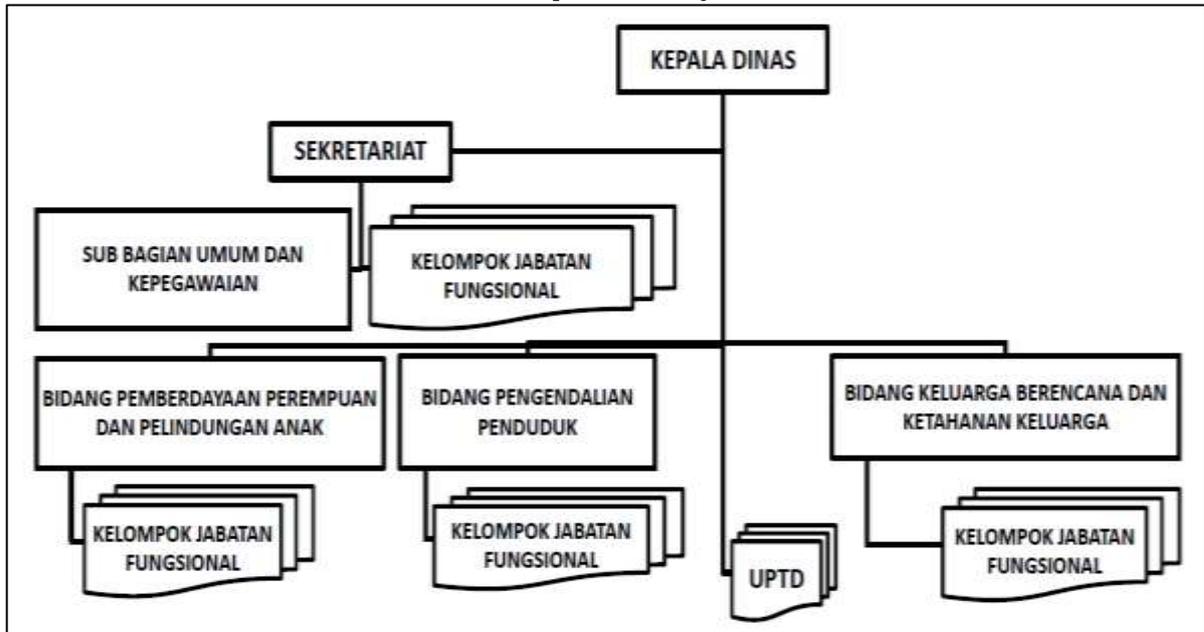
F. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala

Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya. Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Jumlah pemangku/Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peta jabatan. Pembinaan, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, serta rincian tugas Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Diagram 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Perbup Nomor 22 Tahun 2022

Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan. Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahnya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Setiap pimpinan pada Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya sebagai input dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tenaga yang tersedia untuk menyokong dan melaksanakan tugas-tugas PD yang termuat dalam tupoksi demi mewujudkan visi dan misi PD. Kualitas dan kuantitas SDM merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian target kinerja PD yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu SDM dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo selaku pelaksana urusan wajib per Desember 2021 berjumlah 107 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 83 orang merupakan pegawai ASN dan sisanya sebanyak 24 orang merupakan pegawai Non ASN. Lebih detail mengenai jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

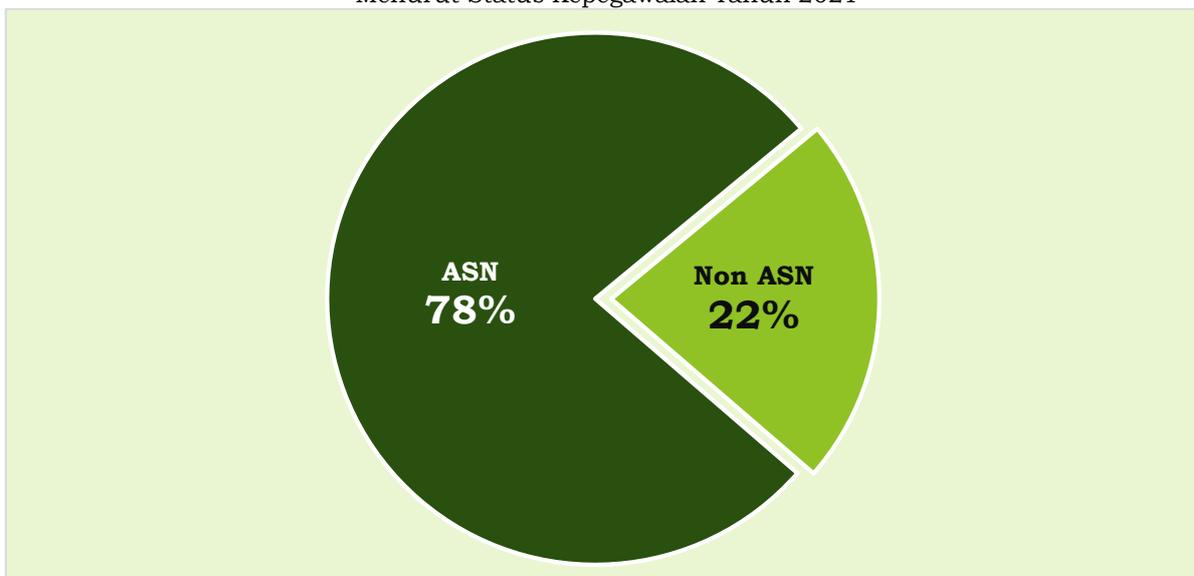
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah (L+P)
	Laki-Laki	Perempuan	
ASN			
Dinas P3AKB	11	19	30
Penyuluh KB	21	32	53
Non ASN			
Staf THL	13	4	17
Konselor	1	6	7
Total	47	61	107

Sumber : Dinas P3AKB, 2022

Diagram 2.2

Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Menurut Status Kepegawaian Tahun 2021



Sumber : Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022

Diagram 2.3

Komposisi Pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo dengan ASN Penyuluh KB Tahun 2021



Sumber : Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022

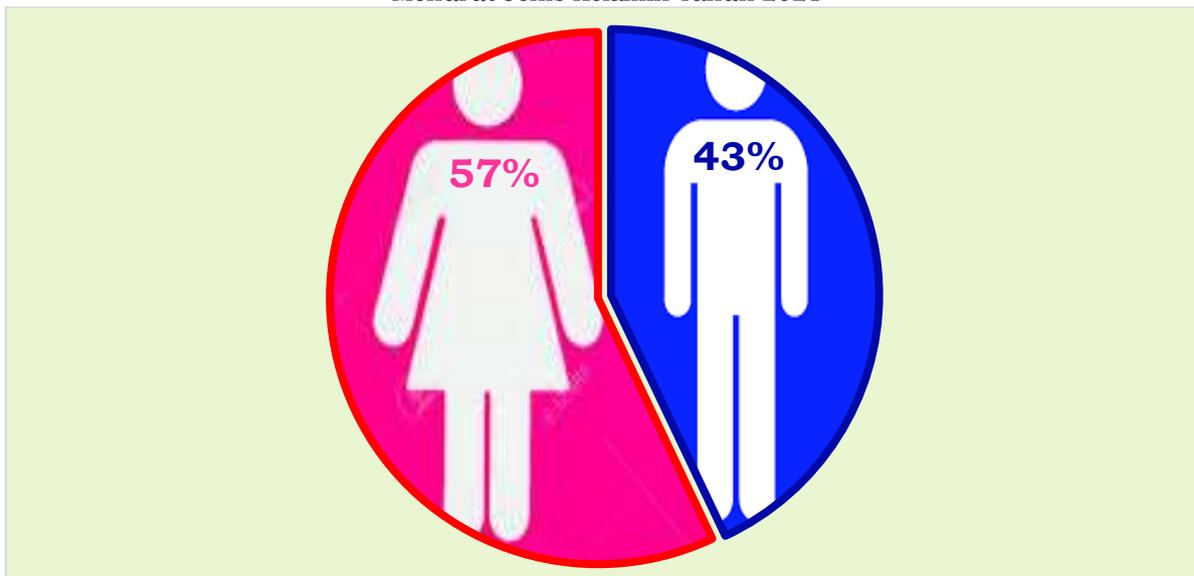
Memperhatikan diagram 2.2 di atas, terlihat bahwa lebih dari 75% pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo merupakan ASN. Sisanya kurang dari 25% adalah pegawai Non ASN yang terdiri dari tenaga harian lepas pada dinas dan konselor. Diagram 2.3 memperlihatkan bahwa jumlah ASN penyuluh KB lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah ASN di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana statusnya adalah ASN pusat yang operasionalnya ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan melaksanakan program

kegiatan BKKBN dan Program Kegiatan Bidang KKBPK yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Dilihat dari jenis kelamin pegawai maka jumlah pegawai perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pegawai laki-laki. Tercatat lebih dari separuh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo adalah perempuan.

Diagram 2.4

Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021



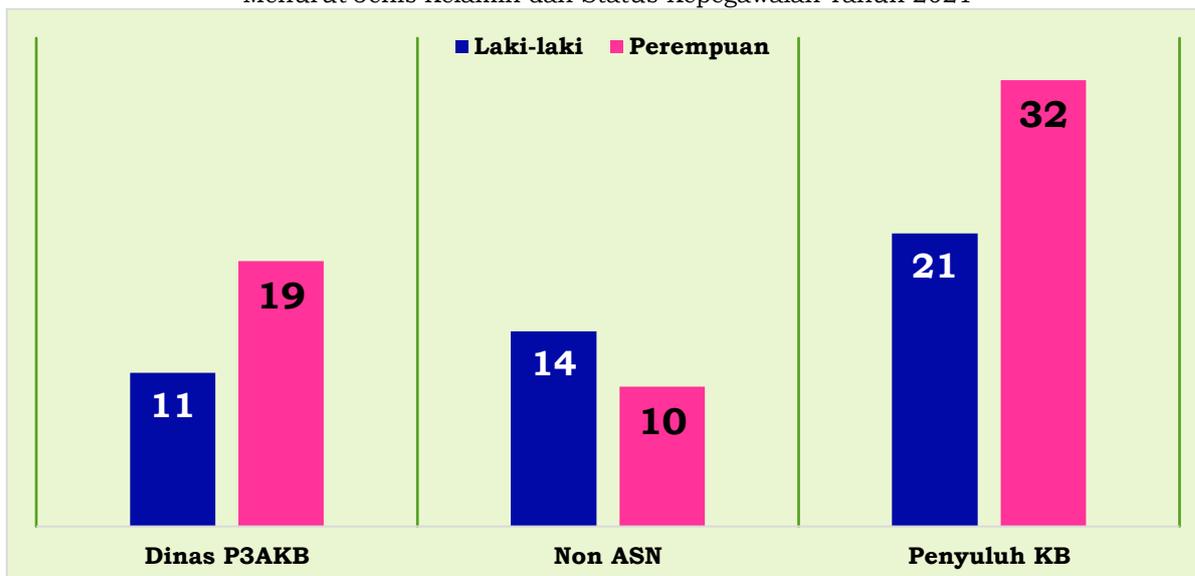
Sumber : Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022

Memperhatikan diagram 2.4 di atas, 56% atau 61 orang pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo adalah perempuan. Sisanya sebanyak 44% atau 47 orang merupakan pegawai laki-laki.

Dilihat lebih detail lagi berdasarkan data yang ada, komposisi dari 108 pegawai tersebut jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dan status kepegawaian terdapat fakta menarik. Tidak selamanya jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki. Data yang berhasil dikumpulkan memperlihatkan jumlah pegawai laki-laki untuk Non ASN tercatat lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Berbeda dengan komposisi pegawai pada ASN yang didominasi oleh pegawai perempuan. Data yang ada memperlihatkan bahwa jumlah pegawai perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo lebih banyak jika dibandingkan pegawai laki-laki. Demikian pula dengan penyuluh KB yang ada di Kabupaten Sidoarjo, terlihat jumlah pegawai perempuan lebih banyak. Hal ini sebagaimana terlihat pada diagram di bawah ini.

Diagram 2.5

Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian Tahun 2021



Sumber : Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022

Selanjutnya perlu diuraikan komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat golongan. Dari 84 pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo yang berstatus ASN, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Proporsi Pegawai ASN Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

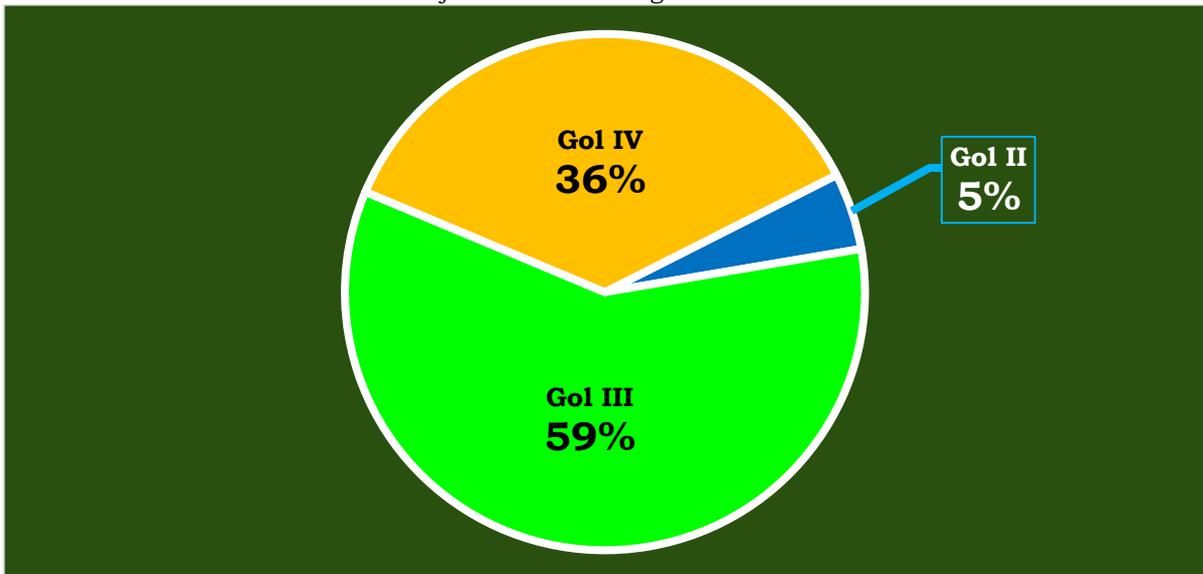
No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		L	P	
1	Dinas P3AKB			
	Golongan I/Juru	0	0	0
	Golongan II/Pengatur	0	3	3
	Golongan III/ Penata	7	14	21
	Golongan IV/ Pembina	4	2	6
2	Penyuluh KB			
	Golongan I/Juru	0	0	0
	Golongan II/Pengatur	0	1	1
	Golongan III/ Penata	10	18	28
	Golongan IV/ Pembina	11	13	24
	Jumlah	32	51	83

Sumber : Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022

Diagram di bawah ini akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai komposisi pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan (termasuk Penyuluh KB) berdasarkan golongan ruang.

Diagram 2.6

Komposisi Pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Menurut Golongan Tahun 2021



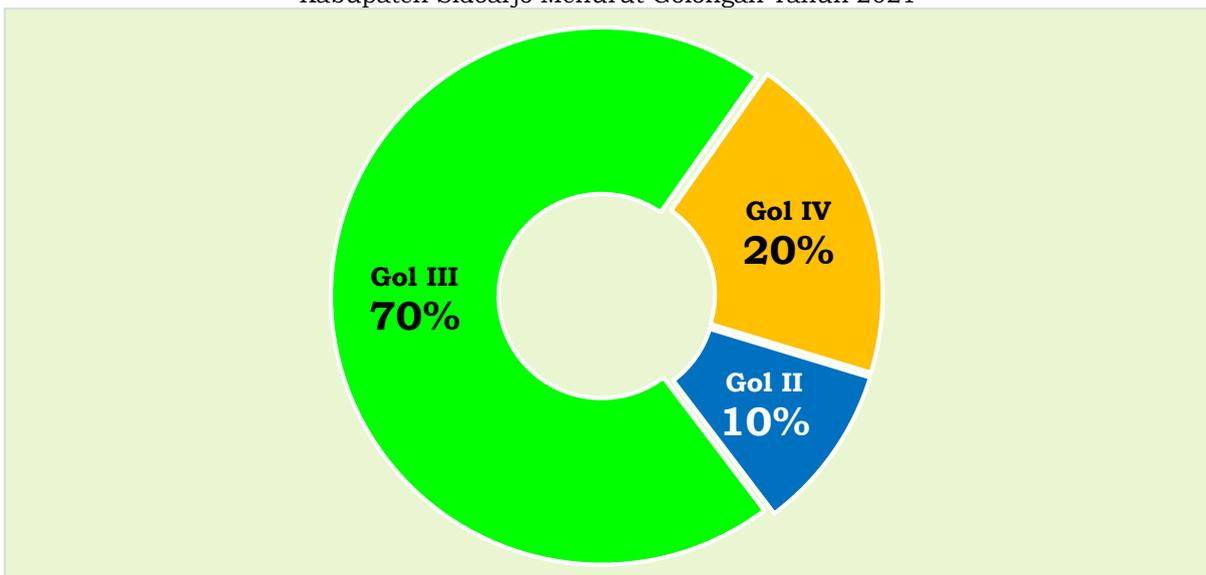
Sumber : Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022

Memperhatikan tabel 2.2 dan diagram 2.6 di atas, terlihat bahwa terlihat lebih dari separuh (58%) pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo berada pada level golongan Penata.

Manakala dilihat lebih spesifik pada ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo ditemukan fakta cukup menarik. Komposisi golongan III (Penata) jauh lebih dominan sebagaimana terlihat pada diagram berikut ini.

Diagram 2.7

Komposisi Pegawai ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Menurut Golongan Tahun 2021



Sumber : Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022

Berdasarkan diagram 2.7 di atas, tercatat 70% ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo berada

dalam golongan Penata. Dilihat dari persyaratan golongannya, maka yang menempati golongan ini adalah mereka dengan pendidikan formal jenjang S1 atau Diploma IV ke atas, atau yang setingkat. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pekerjaan-pekerjaan di tingkat kepangkatan Penata sudah mulai menuntut suatu keahlian bidang ilmu tertentu dengan lingkup pemahaman kaidah ilmu yang telah mendalam. Dengan pemahamannya yang komprehensif tentang sesuatu maka Penata bukan lagi sekedar pelaksana, melainkan sudah memiliki tanggung jawab menjamin mutu proses dan keluaran kerja tingkatan Pengatur. Dengan proporsi yang demikian maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo ini seharusnya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan cukup baik.

Memperhatikan komposisi pegawai yang demikian, maka tugas dari pucuk pimpinan organisasi, baik Kepala Dinas, Sekretaris hingga Kepala Bidang tinggal mengoptimalkan potensi yang ada tersebut. Penanganan yang tepat terhadap sumber daya yang ada tersebut tentunya akan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian diharapkan target-target yang ditetapkan akan dapat dengan optimal diselesaikan.

Kondisi tersebut tentunya bukan sekedar isapan jempol manakala melihat struktur jabatan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo. Sebagian besar pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo menempati jenjang jabatan Fungsional baik Fungsional Umum maupun Fungsional Tertentu sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3

Proporsi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

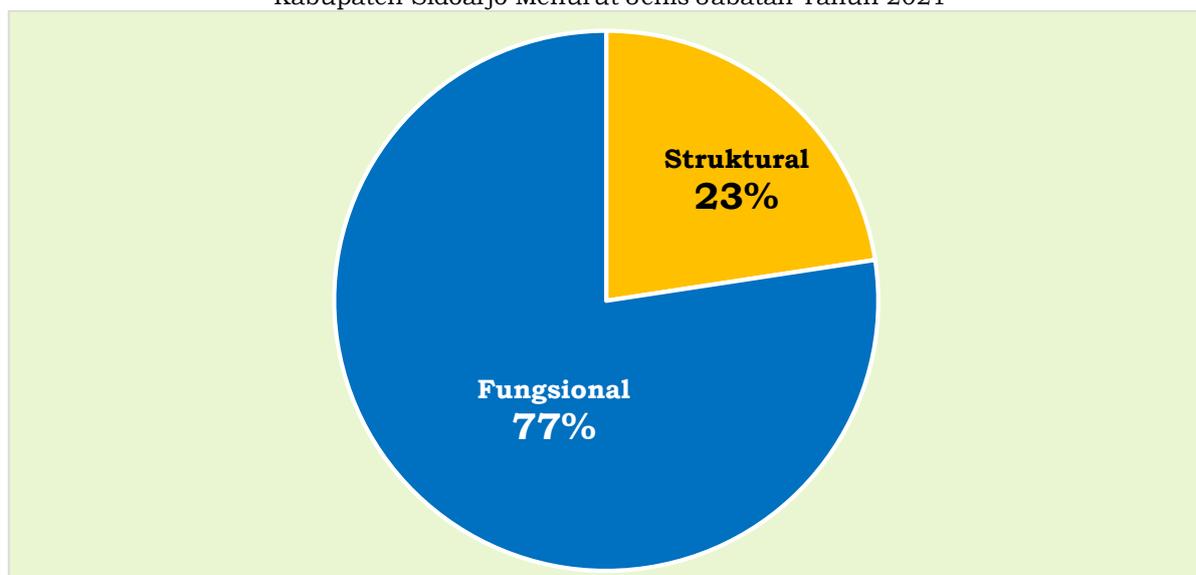
No	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki+Perempuan
1	Struktural	4	3	7
2	Fungsional Umum	3	10	13
3	Fungsional Tertentu	4	6	10
Jumlah		11	18	30

Sumber : Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022

Memperhatikan tabel 2.3 di atas, maka komposisi pegawai ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan cukup ideal. Komposisi fungsional yang cukup dominan diharapkan mampu mengakselerasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditargetkan. Hal ini sebagaimana terlihat pada diagram di bawah ini.

Diagram 2.8

Komposisi Pegawai ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Jabatan Tahun 2021



Sumber : Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022

Selanjutnya dari aspek akademis, proporsi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo terbilang juga cukup baik. Tercatat lebih dari separuh pegawai pada PD ini berpendidikan S-1 dan S-2. Bahkan apabila ditambah dengan jenjang Diploma, maka dapat mencapai 70% lebih. Lebih detail mengenai komposisi SDM berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.4

Proporsi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

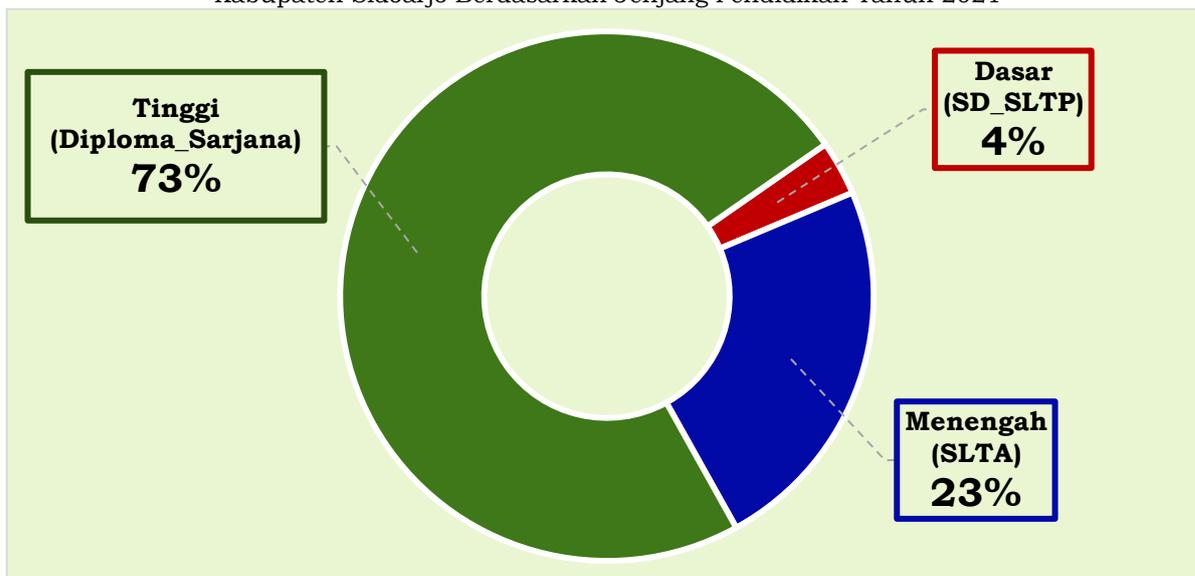
No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	1	0	1
2	SLTP Sederajat	0	0	1
3	SLTA Sederajat	2	5	7
4	Diploma 3	0	1	1
5	S-1	8	10	18
6	S-2	0	3	3
Jumlah		11	19	30

Sumber : Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo (71%) telah menempuh jenjang pendidikan tinggi (Diploma hingga Sarjana). Jenjang pendidikan selanjutnya yang banyak ditempuh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo adalah jenjang pendidikan Menengah (SLTA) yaitu sebesar 20,41%. Kepiawaian jajarman manajerial PD ini memegang peranan yang sangat krusial dalam upaya mengoptimalkan sumber daya manusia yang beraneka ragam. Dalam hal ini tidak hanya dalam aspek pendidikan, tetapi juga kualitas maupun kompetensi yang mereka miliki.

Grafik 2.9

Persentase Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021



Sumber : Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022

2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal. Guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah
1	Tanah	1 unit
2	Alat Besar	2 unit
3	Alat Angkutan	106 unit
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	762 unit
5	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	96 unit
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	18 unit
7	Alat Laboratorium	1 unit
8	Komputer	125 unit
9	Bangunan Gedung	7 unit
10	Instalasi	2 unit
11	Jaringan	4 jaringan
12	Bahan Perpustakaan	92 buah
13	Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan/olahraga	1 unit
14	Aset Tidak Berwujud	1 unit
15	Aset Lain-lain	464 unit

Sumber : Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, yang secara rinci menyelenggarakan lima fungsi sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2022 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PUS yang ikut KB	-	-	-	80,25	81,29	81,43	81,55	81,61	83,11	83,61	81,55	81,58	79	104	103	100	100	97
2	Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan	-	-	-	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,46	0,31	0,26	0,59	0,69	119,57	161,29	173,08	67,80	50,72
3	Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) yang Mandiri	-	-	-	70	71	72	73	74	70,15	70,63	71,04	75,37	75,71	100,21	70,63	98,67	103,25	102
4	CBR (Crude Birth Rate)	-	-	-	10 (per 1000 KH)	12,5	16,8	16,4	16	17,32	16,80	13,796	12,98	12,98	173,2	74,40	118,84	126,35	123,27
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	64,6	64,65	64,7	64,75	64,8	N/A	64,65	64,46	67,13	67,13	-	100	99,63	103,68	103,6

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
6	Persentase Kasus Kekerasan dan Traficking Terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : LKPJ/LKJiP Tahun 2020

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal utamanya Pasangan Usia Subur sebagai peserta KB aktif sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada tingkat capaian stagnasi yaitu pada kisaran angka 81,5%, pengendalian penduduk melalui CBR dimana periode 2 tahun sebelumnya stagnasi pada angka 12,98 (10/per 1000 penduduk) perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 tahun kedepannya. IDG dengan angka stagnan 67,13 walaupun dalam kondisi baik perlu dioptimalkan untuk ditingkatkan, sehingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dalam rangka membangun keluarga sejahtera dan tangguh dapat lebih optimal.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	-	-	-	2.317.210.624,00	2.514.173.486,00	-	-	-	1.864.471.290,00	1.959.961.435,00	-	-	-	80,46	77,96	8,50	5,12
	Penyediaan barang/jasa perkantoran	-	-	-	1.190.355.370,00	1.067.929.486,00	-	-	-	872.656.965,00	850.974.967,00	-	-	-	73,31	79,68	-10,28	-2,48
	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	-	-	-	567.773.344,00	272.383.000,00	-	-	-	563.938.045,00	212.828.378,00	-	-	-	99,32	78,14	-52,03	-62,26
	Pengelolaan & penatalaksanaan barang milik daerah	-	-	-	2.180.500,00	2.180.500,00	-	-	-	594.000,00	2.000.000,00	-	-	-	27,24	91,72	0,00	236,70
	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	217.439.120,00	836.950.500,00	-	-	-	194.970.790,00	609.762.250,00	-	-	-	89,67	72,86	284,91	212,75
	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	149.787.000,00	301.847.000,00	-	-	-	144.325.630,00	265.350.190,00	-	-	-	96,35	87,91	101,52	83,86

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan pakaian dinas & kelengkapan aparatur	-	-	-	131.500.000,00	11.961.100,00	-	-	-	30.362.510,00	7.486.300,00	-	-	-	23,09	62,59	-90,90	-75,34
	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	-	-	-	50.076.790,00	15.507.300,00	-	-	-	49.603.960,00	6.627.750,00	-	-	-	99,06	42,74	-69,03	-86,64
	Penyusunan laporan keuangan	-	-	-	3.429.350,00	5.414.600,00	-	-	-	3.388.350,00	4.931.600,00	-	-	-	98,80	91,08	57,89	45,55
2	Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	-	-	-	1.787.325.956,50	1.885.716.739,00	-	-	-	1.567.187.445,00	1.655.732.546,00	-	-	-	87,68	87,80	5,50	5,65
	Advokasi, Koordinasi, Pembinaan dan evaluasi pemenuhan hak anak	-	-	-	93.525.572,50	309.287.600,00	-	-	-	91.090.560,00	294.182.250,00	-	-	-	97,40	95,12	230,70	222,96
	Advokasi, Koordinasi, Pembinaan dan evaluasi perlindungan perempuan & perlindungan khusus anak	-	-	-	66.049.750,00	77.000.900,00	-	-	-	65.746.150,00	74.210.900,00	-	-	-	99,54	96,38	16,58	12,87

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Advokasi, Koordinasi, Pembinaan dan evaluasi PUG	-	-	-	128.535.500,00	384.894.400,00	-	-	-	124.835.500,00	261.091.295,00	-	-	-	97,12	67,83	199,45	109,15
	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja & masyarakat (dana cukai)	-	-	-	792.047.450,00	399.744.475,00	-	-	-	736.281.900,00	333.986.675,00	-	-	-	92,96	83,55	-49,53	-54,64
	Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	-	-	-	707.167.684,00	714.789.364,00	-	-	-	549.233.335,00	692.262.426,00	-	-	-	77,67	96,85	1,08	26,04
	Program Pengelolaan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	-	-	-	9.372.015.549,00	12.864.487.599,00	-	-	-	7.402.272.705,00	11.669.006.925,00	-	-	-	78,98	90,71	37,26	57,64
	Pembinaan dan pelayanan KB (DAK)	-	-	-	4.791.232.599,00	4.433.557.599,00	-	-	-	2.835.757.705,00	3.325.928.175,00	-	-	-	59,19	75,02	-7,47	17,29
	Pembinaan kesehatan reproduksi remaja	-	-	-	19.994.500,00	24.342.000,00	-	-	-	17.536.000,00	19.595.500,00	-	-	-	87,70	80,50	21,74	11,74

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Advokasi dan KIE	-	-	-	15.503.450,00	104.496.600,00	-	-	-	13.641.000,00	88.258.500,00	-	-	-	87,99	84,46	574,02	547,01
	Peningkatan kualitas Ketahanan Keluarga	-	-	-	4.539.001.000,00	8.233.081.400,00	-	-	-	4.529.483.000,00	8.225.124.250,00	-	-	-	99,79	99,90	81,39	81,59
	Pembinaan keluarga berencana	-	-	-	6.284.000,00	69.010.000,00	-	-	-	5.855.000,00	10.100.500,00	-	-	-	93,17	14,64	998,19	72,51
	Program pengendalian kependudukan	-	-	-	563.132.000,00	1.133.895.000,00	-	-	-	547.329.800,00	1.125.682.650,00	-	-	-	97,30	94,29	112,01	105,44
	Pengelolaan data kependudukan	-	-	-	408.739.800,00	959.646.900,00	-	-	-	396.820.800,00	894.092.350,00	-	-	-	97,08	93,17	134,78	125,31
	Penyusunan analisa kebijakan pengendalian kependudukan	-	-	-	154.392.200,00	234.248.100,00	-	-	-	151.109.000,00	231.590.300,00	-	-	-	97,87	98,87	51,72	53,26

Sumber : Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022

Tingkat realisasi belanja 2 tahun terakhir sudah di atas 80%, sehingga sudah cukup optimal mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Demikian pula dengan tingkat pertumbuhan anggaran mencapai 25% dan realisasi anggaran/realisasi belanja mencapai 39%. Meskipun demikian tingkat penyerapan hanya pada angka 80%-90% artinya peningkatan anggaran belum sepenuhnya dapat terserap.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

Mengacu pada analisis terhadap Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024. Dalam hal ini khususnya menyangkut keselarasan dengan tujuan yakni (i) Meningkatkan Kesetaraan Gender; (ii) Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak; (iii) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA; (iv) Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO; dan (v) Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak sudah selaras dengan tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan PD ini adalah Mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat dengan sasaran Meningkatnya kesetaraan gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sedangkan pada analisis terhadap Renstra BKKBN Pusat Tahun 2020 – 2024, khususnya menyangkut keselarasan dengan tujuan yakni (i) Mewujudkan keluarga berkualitas; dan (ii) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sasaran Menurunnya Angka Kelahiran, Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern, Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun, Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dan Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP). Pada dasarnya sudah selaras dengan Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo yakni Mewujudkan pengendalian penduduk melalui pengoptimalan pencapaian keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo yakni Mewujudkan pengendalian penduduk melalui pengoptimalan pencapaian keluarga berencana dan keluarga

sejahtera dan Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah.

Selanjutnya analisis terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, khususnya menyangkut tujuan yaitu Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Terlihat sudah selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo untuk Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Demikian pula analisis terhadap tujuan Renstra BKKBN Perwakilan Provinsi Jatim yakni Menurunnya Angka kelahiran total (TFR), Meningkatnya prevalensi Kontrasepsi (CPR) Modern, Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, Meningkatnya peserta KB aktif dan Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi sudah selaras dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo untuk Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Secara sistematis, hasil kajian/telaah terhadap Renstra Kementerian, BKKBN Pusan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Jatim dan BKKBN Perwakilan Prov Jatim, dikaitkan dengan keselarasan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, terdapat peluang dan tantangan dalam 5 tahun ke depan yang dihadapi berkaitan dengan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

A. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah. Salah satu hal yang mudah dilihat adalah keselarasan tujuan dan sasaran dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Adanya kepedulian dan partisipasi lembaga-lembaga peduli perempuan dan anak serta masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;

- 4) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak, sehingga dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 5) Pada banyak kalangan, peran serta keluarga berkaitan dengan keikutsertaan dalam ber KB cukup responsif. Satu keluarga dengan dua anak cukup telah menjadi budaya untuk membangun keluarga sejahtera. Meskipun demikian tetap perlu digelorakan pada kalangan tertentu yang masih resisten terhadap program KB.

B. Tantangan

- 1) Masih perlunya kepedulian banyak pihak dalam rangka peningkatan peran perempuan dalam politik, sosial dan ekonomi;
- 2) Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan anak masih terus terjadi walaupun bersifat fluktuatif;
- 3) Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- 4) Penggunaan media sosial dan aplikasi *online* oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki *smartphone* menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, tindak kekerasan, pelecehan seksual dan penipuan, serta akses negatif lainnya;
- 5) Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak;
- 6) Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB sebagai peserta KB aktif belum optimal.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo sebagai organisasi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Indeks Pembangunan Gender (IPM perempuan) perlu dioptimalkan, demikian pula terhadap Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) juga perlu ditingkatkan melalui kepedulian banyak pihak terkait dengan keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi;
2. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen yaitu keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan, dan sumbangan pendapatan perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah melalui penempatan pada jabatan strategis ditingkat eksekutif, kepedulian Partai Politik menempatkan anggota khususnya perempuan pada jajaran anggota legislatif, di lembaga swasta juga memberikan hak yang sama/kesejajaran antara laki laki dan perempuan;
3. Kasus kekerasan terhadap perempuan anak utamanya di rumah tangga (KDRT) masih masih terus terjadi walau bersifat fluktuatif;
4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang mengikuti program KB masih belum sepenuhnya optimal, demikian CBF perlu dioptimalkan capaiannya;
5. Sinergitas, pemerintah, masyarakat dan pihak swasta peduli gender dan perlindungan anak perlu ditingkatkan;
6. Masih belum optimalnya sumber daya manusia yang berkeahlian/mempunyai kompetensi khusus di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. Pembangunan pengembangan wilayah belum dilatarbelakangi/belum berbasis wilayah (Desa/Kelurahan/Kecamatan) layak anak dan belum sepenuhnya mempertimbangkan pembangunan berwawasan kependudukan;

8. Integrasi penduduk dan pembangunan masih hanya sebagai orientasi belum digunakan sebagai prinsip pembangunan berwawasan kependudukan.

Berdasarkan identifikasi masalah terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo kemudian distrukturkan dalam pokok masalah, masalah dan akar masalah berikut ini.

Tabel 3.1

Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah Dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1-2	Tingkat Indeks Pembangunan Gender (IPM perempuan) perlu dioptimalkan, demikian pula terhadap Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga perlu ditingkatkan	IPG dan IDG adalah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap Perkembangan IPM	Lemahnya kepedulian banyak pihak terkait dengan keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi
3	Kasus kekerasan terhadap perempuan anak utamanya di rumah tangga (KDRT) masih terus terjadi walau bersifat fluktuatif	Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga	<ul style="list-style-type: none"> o Banyak masyarakat belum memahami bahwa tindakan KDRT adalah tindakan melawan hukum yang dapat dipidanakan; o Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, penipuan, kasus pornografi dan <i>cyber crime</i>
4	Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB masih belum sepenuhnya optimal, demikian pula CBR perlu dioptimalkan capaiannya	Pada kalangan tertentu tidak sependapat adanya KB, demikian pula banyak masyarakat pada wilayah tertentu yang belum menanggapi KB adalah sarana membentuk Keluarga Sejahtera	Petugas Penyuluh KB (PPKB) belum optimal sepenuhnya dalam melaksanakan tugasnya selain jumlahnya yang terbatas
5	Sinergitas, pemerintah, masyarakat dan pihak swasta peduli gender dan perlindungan anak perlu ditingkatkan	Kesetaraan Gender belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan pada semua tingkatan pemerintahan	Lembaga Peduli Gender yang jumlah maupun aktivitasnya masih terbatas belum dibina/ difasilitasi pengembangannya secara optimal oleh Pemerintah
6	Masih belum optimalnya sumber daya manusia yang berkeahlian/ mempunyai kompetensi khusus di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Memasaryatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan pengembangan KB oleh Pemerintah daerah belum optimal, disamping itu tidak dijumpai pendidikan khusus formal maupun tidak formal utamanya tentang Kesetaraan Gender.	<ul style="list-style-type: none"> □ Belum adanya Regulasi tentang Kesetaraan Gender dan atau implementasi di tingkat masyarakat □ Banyak kalangan terutama para bapak yang belum sepenuhnya ikhlas bahwa perempuan mempunyai hak kesejajaran dengan para pria
7	Pembangunan pengembangan wilayah belum dilatar belakangi/belum berbasis wilayah (desa/kel/ kecamatan) layak anak & belum sepenuhnya mempertimbangkan pembangunan berwawasan kependudukan	Definisi dan kondisi riil layak anak dan pembangunan berwawasan kependudukan belum dipahamim oleh masyarakat maupun pihak lain terkait	Belum adanya Regulasi pengembangan wilayah berbasis layak anak dan berwawasan kependudukan
8	Integrasi penduduk dan pembangunan masih hanya	Penduduk sebagai subyek maupun obyek dalam rangka	Belum adanya Regulasi/ Kebijakan/Grand Desain

sebagai orientasi belum digunakan sebagai prinsip pembangunan berwawasan kependudukan	mencapai tujuan pembangunan masih belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan berwawasan kependudukan	Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang dijadikan rujukan atau pedoman untuk penyusunan kebijakan pembangunan
---	---	--

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026, yaitu:

”TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER, DAN BERKELANJUTAN”

Visi tersebut mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Visi :
TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER, DAN BERKELANJUTAN

Pokok-Pokok Visi	Penjabaran Visi
Sejahtera	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali;
Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang;

Karakter	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan;
Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Sumber : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Adapun Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;
- Misi 2 Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
- Misi 3 Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
- Misi 4 Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya;
- Misi 5 Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo adalah terkait pada Misi keempat yaitu :

MISI 4 RPJMD :

Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya

dengan tujuan:

“Terwujudnya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya”

dengan Indikator:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Guna mencapai Misi dan Tujuan tersebut sasaran RPJMD yang mendukung adalah Sasaran Kedua : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan Indikator : Usia Harapan Hidup (UHH), dan Sasaran Ketiga yaitu : Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat dengan Indikator: Indeks Pembangunan Gender. Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dalam menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah:

1. Mewujudkan pengarusutamaan gender yang berkeadilan;
2. Terwujudnya pengendalian penduduk melalui pengoptimalan pencapaian keluarga berencana.

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI :			
Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo Yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI 2 :			
Membangun SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Meningkatkan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, serta Kebutuhan Dasar Lainnya			
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat dengan Indikator : Indeks Pembangunan Gender	Belum optimalnya pertumbuhan IPG dan IDG yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap Perkembangan IPM	Belum optimalnya fasilitasi/pemberdayaan terhadap Lembaga yang peduli terhadap perkembangan Gender	Dukungan Pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024
	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih terus terjadi walau bersifat fluktuatif	Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga	KDRT adalah tindakan melawan hukum
	Sebagian masyarakat pada wilayah tertentu yang belum menanggapi KB adalah sarana membentuk Keluarga Sejahtera	Petugas Penyuluh KB (PPKB) belum optimal selain jumlahnya yang terbatas	KB merupakan sarana utama membentuk keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk
	Kesetaraan Gender belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan pada semua tingkatan pemerintahan	Lemahnya kepedulian lembaga dan stakeholder lainnya terkait dengan pembangunan gender	Dalam berkiprah di kancah politik ekonomi dan sosial perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki laki
	Tidak dijumpai pendidikan khusus formal maupun tidak Kesetaraan Gender.	Belum ada kurikulum tentang Gender pada lembaga pendidikan formal maupun tidak formal	Akses pendidikan sejak awal sekolah tidak membedakan adanya Gender dan Non Gender

	Definisi dan kondisi riil wilayah layak anak belum dipahami oleh masyarakat maupun pihak lain terkait	Tidak ada alat ukur yang pasti tentang wilayah layak anak	Parameter tentang wilayah (Kab/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan layak yang sudah ada perlu disosialisasikan pada semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat
	Penduduk sebagai subyek maupun obyek tujuan pembangunan masih belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan berwawasan kependudukan	Kebijakan terkait penanganan isu isu kependudukan masih berjalan sangat lemah	Kepedulian pemerintah untuk Membuat tentang parameter pembangunan yang berwawasan kependudukan

Sumber : Hasil Focus Group Discussion

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dengan Renstra Kementerian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo menangani dua urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga telaah renstra dari kementerian ada dua, yaitu :

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 menetapkan 6 tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan, dengan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan;
- ✓ Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak, dengan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
- ✓ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA, dengan sasaran strategis Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;

- ✓ Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO, dengan sasaran strategis Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO;
- ✓ Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak, dengan sasaran strategis Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus;
- ✓ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian PPPA, dengan sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA.

2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 memiliki tujuan untuk:

- ✓ Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia;
- ✓ Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sedangkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- ✓ Menurunnya Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR).
- ✓ Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR);
- ✓ Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ *Unmet Need*;
- ✓ Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/ *Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun;
- ✓ Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga);
- ✓ Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP).

Tujuan dan Sasaran umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta BKKBN, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga seharusnya dapat disenergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian (1)	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (2)	Faktor	
		Penghambat (3)	Pendorong (4)
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Perempuan belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan yang sama berkiprah aktivitas pembangunan politik, ekonomi dan sosial	Belum optimalnya fasilitasi/pemberdayaan terhadap Lembaga yang peduli terhadap perkembangan Gender	Peran Perempuan dalam lembaga politik, ekonomi dan sosial akan mendorong pertumbuhan IPM Perempuan
Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak	Wilayah (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa) layak belum dipahami semua jajaran terkait termasuk stakeholder masyarakat, demikian pula pembangunan berwawasan Kependudukan belum menjadi parameter disetiap gerak pembangunan	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga pemenuhan dan perlindungan anak belum optimal, selain masih lemahnya pemahaman terhadap pemenuhan hak anak	Tumbuh kembang anak menjadi sehat dan cerdas adalah tanggungjawab Pemerintah dan Masyarakat serta kepedulian para Stakeholder terkait
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Istilah peningkatan keluarga dan pemberdayaan gender dalam wujud nyata masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat	Kepedulian banyak pihak yang masih lemah terhadap kesetaraan Gender	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo
Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO.	Kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak masih terus terjadi demikian pula kasus <i>trafficking</i> yang juga masih terjadi	Kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak masih terus terjadi demikian pula kasus <i>trafficking</i> yang juga masih terjadi	Kekerasan terhadap Perempuan dan anak adalah Pelanggaran Hukum
Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih terus terjadi walau bersifat fluktuatif demikian pula kasus <i>trafficking</i> yang juga masih terjadi	Faktor psikologis keluarga sering kali masih menjadi hambatan dalam keterbukaan adanya korban kasus kekerasan yang memerlukan perlindungan/pendampingan	Optimalisasi layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus menjadi kewajiban Pemerintah dan Pihak terkait

Sumber : Hasil Focus Group Discussion

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Renstra BKKBN Pusat

Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN (1)	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (2)	Faktor	
		Penghambat (3)	Pendorong (4)
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR), Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern, Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi dan Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun	Sebagian masyarakat pada wilayah tertentu yang belum menanggapi KB adalah sarana membentuk Keluarga Sejahtera	Petugas Penyuluh KB (PPKB) belum optimal dalam melaksanakan tugasnya selain jumlahnya yang terbatas	KB merupakan sarana utama membentuk keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk
Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dan Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Penduduk sebagai subyek maupun obyek tujuan pembangunan masih belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan berwawasan kependudukan	Kebijakan terkait penanganan isu-isu kependudukan masih berjalan sangat lemah	Kepedulian pemerintah untuk membuat Kebijakan tentang parameter pembangunan yang berwawasan kependudukan

Sumber : Hasil Focus Group Discussion

Tujuan dan Sasaran umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta BKKBN Pusat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya bersejajar secara substansi sama dan saling mendukung, sehingga seharusnya dapat disenergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur

Pada telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur akan dijabarkan mengenai tujuan dan sasaran terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah tujuan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, yaitu: Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, dengan sasaran :

- ✓ Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan perempuan;
- ✓ Meningkatnya perlindungan anak;
- ✓ Meningkatnya pengendalian penduduk.

Sedangkan tujuan pada Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, yaitu : Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju

Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas, dengan sasaran :

- ✓ Menurunnya Angka kelahiran total (TFR);
- ✓ Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern;
- ✓ Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*);
- ✓ Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- ✓ Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas P3AK Prov Jatim	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan perempuan.	Perempuan belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan yang sama berkiprah aktivitas pembangunan politik, ekonomi dan sosial	Belum optimalnya fasilitasi/pemberdayaan terhadap Lembaga yang peduli terhadap perkembangan Gender	Peran Perempuan dalam lembaga politik, ekonomi dan sosial akan mendorong pertumbuhan IPM Perempuan
Meningkatnya perlindungan anak.	Wilayah (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa) layak anak belum dipahami semua jajaran terkait termasuk stake holder masyarakat, demikian pula pembangunan berwawasan Kependudukan belum menjadi parameter disetiap gerak pembangunan	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga pemenuhan dan perlindungan anak belum optimal, selain masih lemahnya pemahaman terhadap pemenuhan hak anak	Tumbuh kembang anak menjadi sehat dan cerdas adalah tanggung jawab Pemerintah dan Masyarakat serta kepedulian para Stakeholder terkait
Meningkatnya pengendalian Penduduk	Sebagian masyarakat pada wilayah tertentu yang belum menanggapi KB adalah sarana membentuk Keluarga Sejahtera	Petugas Penyuluh KB (PPKB) belum optimal dalam melaksanakan tugasnya selain jumlahnya yang terbatas	KB merupakan sarana utama membentuk keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk

Sumber : Hasil Focus Group Discussion

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Renstra BKKBN Provinsi Jawa Timur

Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN Prov Jatim	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	Sebagian masyarakat pada wilayah tertentu yang belum menanggapi KB adalah sarana	Petugas Penyuluh KB (PPKB) belum optimal dalam melaksanakan tugasnya selain jumlahnya yang terbatas	KB merupakan sarana utama membentuk keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk
Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern			

Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	membentuk Keluarga Sejahtera		
Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi			

Sumber : Hasil Focus Group Discussion

Tujuan dan Sasaran umum pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tersebut, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga seharusnya dapat disenergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dalam pasal 32 disebutkan bahwa : (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang, beserta pembiayaannya yang didasarkan atas tata ruang dan (2) Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan program pembangunan yang berwawasan lingkungan atau berkaitan dengan penggunaan ruang harus disesuaikan dan disinkronisasikan dengan tata ruang yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menggariskan bahwa bagian pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 menyebutkan bahwa visi penataan wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah terciptanya Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan. Kondisi inilah yang secara berangsur akan diwujudkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembangunan lima tahun mendatang. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Sidoarjo tidak berkaitan secara langsung dengan rencana tata ruang wilayah, namun lebih menitik beratkan pada program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, serta wajib melaksanakan KLHS tersebut ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Renstra OPD.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya/langkah pencegahan terhadap timbulnya dampak negatif kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seiring dengan semakin meningkatnya masalah lingkungan hidup di berbagai wilayah. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo tidak berkaitan secara langsung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, karena rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS, diketahui faktor pendorong dan penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

📁 Faktor Pendorong, antara lain:

- a. Optimalisasi pelayanan organisasi terhadap pengrusutamaan gender menjadi kewajiban pemerintah, stakeholder terkait termasuk kelompok masyarakat peduli perempuan dan anak;
- b. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak;
- c. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyediaan fasilitas pendidikan formal dan non formal;
- d. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- e. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak, sehingga dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

📁 Faktor Penghambat, antara lain:

- a. Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung optimalisasi penarusutamaan gender, dan pengendalian penduduk melalui peran serta aktif KB;
- b. Kepedulian Lembaga yang mempunyai kewenangan masih lemah dalam peningkatan peran perempuan dalam politik, sosial dan ekonomi, dan ini memerlukan dukungan dan kepedulian para stakeholder terkait;
- c. Kasus kekerasan terhadap perempuan anak masih fluktuatif, namun demikian masih terus terjadi dan pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- d. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
- e. Kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas pelayanan dan SDM dalam bidang pengarusutamaan gender dan KB;

- f. Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB masih belum optimal, karena pada kalangan tertentu KB belum dijadikan sebuah budaya dalam membangun rumah tangga dan keluarga sejahtera.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka isu-isu strategis perlu mendapat perhatian serius untuk penanganan melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, sehingga Tujuan dalam Perubahan Renstra OPD yaitu :

1. Mewujudkan pengarusutamaan gender yang berkeadilan;
2. Terwujudnya pengendalian penduduk melalui pengoptimalan pencapaian keluarga berencana akan dapat tercapai secara lebih optimal.

Metode penentuan isu-isu strategis pada Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara : (i) dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FDG) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis; dan (ii) Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rumusan Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	15
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
TOTAL		100

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 6, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Penetapan Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Tingkat Indeks Pembangunan Gender (IPM perempuan) perlu dioptimalkan, demikian pula terhadap Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga perlu ditingkatkan	20	15	20	10	10	20	95
2	Keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan, dan sumbangan pendapatan perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah, kepedulian Porpol	20	10	20	10	10	20	90

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
	dan di lembaga swasta juga memberikan hak yang sama/kesejajaran antara laki laki dan perempuan							
3	Kasus kekerasan terhadap perempuan anak utamanya di rumah tangga (KDRT) masih masih terus terjadi	10	15	15	10	10	10	70
4	Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB masih belum sepenuhnya optimal, demikian CBF perlu dioptimalkan capaiannya	10	15	10	10	10	10	65
5	Sinergitas, pemerintah, masyarakat dan pihak swasta peduli gender dan perlindungan anak perlu ditingkatkan	10	15	15	10	10	10	70
6	Masih belum optimalnya sumber daya manusia yang berkeahlian/ mempunyai kompetensi khusus di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	10	10	10	10	10	10	60
7	Pembangunan pengembangan wilayah belum dilatar belakangi/belum berbasis wilayah (desa/kelurahan/kecamatan) layak anak dan belum sepenuhnya mempertimbangkan pembangunan berwawasan kependudukan	10	10	10	10	10	10	60

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Indeks Pembangunan Gender (IPM perempuan) perlu dioptimalkan, demikian pula terhadap Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga perlu ditingkatkan;
2. Keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan, dan sumbangan pendapatan perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah, kepedulian Porpol dan di lembaga swasta juga memberikan hak yang sama/kesejajaran antara laki laki dan perempuan;
3. Kasus kekerasan terhadap perempuan anak utamanya di rumah tangga (KDRT) masih masih terus terjadi;
4. Sinergitas, pemerintah, masyarakat dan pihak swasta peduli gender dan perlindungan anak perlu ditingkatkan sinergi antar sektor pendukung (*stakeholder*) dalam rangka terciptanya inovasi masih rendah;
5. Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB masih belum sepenuhnya optimal, demikian CBR perlu dioptimalkan capaiannya rendahnya akses petani terhadap pembiayaan;
6. Pembangunan pengembangan wilayah belum dilatar belakangi/belum berbasis wilayah (Desa/Kelurahan/Kecamatan) layak anak dan belum sepenuhnya mempertimbangkan pembangunan berwawasan kependudukan;

7. Masih belum optimalnya sumber daya manusia yang berkeahlian/mempunyai kompetensi khusus di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021- 2026 disusun dengan berlandaskan Visi Bupati terpilih yaitu:

”TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER, DAN BERKELANJUTAN”

Dalam dokumen RPJMD tahun 2021 – 2026, Visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) Misi untuk mewujudkannya, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya;
5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Selain Visi dan Misi tersebut di atas, Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya 17 (tujuh belas) Program Prioritas yaitu:

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru;
2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga;
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin;
4. 10.000 Beasiswa Kuliah;
5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama;
6. Rp 5 Juta – Rp 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan;
7. Rp 6 Juta Operasional RT Per Tahun;

8. Dua puluh ribu (20.000) UMKM Naik Kelas;
9. Penataan Kabupaten dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan;
10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu;
11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer;
12. Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda;
13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi;
14. Tingkatkan ADD untuk Desa Sejahtera;
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respons Cepat;
16. Reformasi Perizinan untuk Bisnis Kondusif;
17. Perluas RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo tidak mempunyai tugas khusus secara langsung terkait dengan pelaksanaan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, namun demikian program/kegiatan yang dilakukan akan memberikan dukungan terealisasinya 17 Program Prioritas tersebut, khususnya pada Prioritas 12 yaitu : **Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda** melalui optimalisasi aktivitas Forum Anak Sidoarjo dan Prioritas 15 yaitu : **24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat** terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan 5 (lima) misi RPJMD tersebut di atas, serta memperhatikan 17 (tujuh belas) Program Prioritas Bupati terpilih yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Misi ke 4 yaitu : **"Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya"**

Adapun Tujuan dari Misi Keempat RPJMD tersebut adalah : **"Terwujudnya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya"** dengan Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam RPJMD, Tujuan tersebut diatas dicapai dengan 3 (tiga) Sasaran yang terkait langsung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo yaitu Sasaran Kedua : *Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat* dengan Indikator : Usia Harapan Hidup (UHH), dan Sasaran Ketiga yaitu: *Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat* dengan Indikator : Indeks Pembangunan Gender.

Sinergi dan sinkronisasi, keselarasan antara RPJMD dengan Renstra diawali pada saat menetapkan Tujuan Renstra secara substansi bukan sekedar persamaan narasi adalah Sasaran RPJMD, karena pada dasarnya tercapainya Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD karena support dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan OPD, karena penganggaran/pendanaan tersedia melalui Program, Kegiatan/Sub Kegiatan pada DPA OPD yang telah ditetapkan.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan memperhatikan 17 (tujuh belas) Program Prioritas Bupati tersebut diatas, dan relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo menetapkan Tujuan dalam Perubahan Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Mewujudkan pengarusutamaan gender/kesetaraan gender dalam masyarakat dengan Indikator : Indeks Pembangunan Gender (IPG);
2. Mewujudkan pengendalian penduduk melalui pengoptimalan pencapaian keluarga berencana dengan Indikator : Usia/Angka Harapan Hidup (U/AHH)

❖ **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Indeks* (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM.

Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia, semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

❖ **Usia/Angka Harapan Hidup (U/AHH)**

Merupakan tingkat rata-rata orang hidup/tingkat usia di Kabupaten Sidoarjo. Keberhasilan Program Pembangunan pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan hidup penduduk suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui faskes, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai

pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Rata-rata AHH di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup tinggi selama empat tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan tren meningkat yaitu dari 73,67 (2016) menjadi 73,98 (2020), atau rata-rata 5 tahun terakhir angka 73,83 tahun.

Rumusan atas Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu tahun 2021-2026 dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk melalui keluarga berencana;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi;
- d. Memiliki orientasi ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dan juga *stake holders*.

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo adalah :

TUJUAN 1	Mewujudkan Kesetaraan/pengarusutamaan gender dalam masyarakat
INDIKATOR	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
URUSAN	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
SASARAN	Meningkatnya kesetaraan gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak
INDIKATOR	1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2) Persentase Kasus Kekerasan dan Traficking Terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan

TUJUAN 2	Mewujudkan pengendalian penduduk melalui pengoptimalan pencapaian keluarga berencana dan keluarga sejahtera
-----------------	---

INDIKATOR	Usia/Angka Harapan Hidup (A/UHH)
URUSAN	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
SASARAN 1	Meningkatnya pencapaian Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera dalam RANGKA Pengendalian Penduduk
INDIKATOR	1) Persentase PUS yang ikut KB 2) Persentase pencapaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR) 3) Persentase pendewasaan usia perkawinan
SASARAN 2	Meningkatnya Implementasi pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk
INDIKATOR	1) Total Fertility Rate (TFR) 2) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
SASARAN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
INDIKATOR	1) Nilai SAKIP 2) Nilai IRB 3) Nilai IPP 4) Nilai IKM/SKM 5) Persentase Serapan Anggaran

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdaya guna merupakan penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya yaitu SDM dan sarana dan prasarana lainnya, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. Guna merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026, memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Pengarusutamaan/ Kesetaraan Gender yang Berkeadilan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.13	94.53	94.95	95.37	95.77	96.25
		Meningkatkan Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67.3	67.4	67.5	67.6	67.7	67.8
			2. Persentase Kasus Kekerasan dan Traficking terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk Melalui Pengoptimalan Pencapaian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,08	1,95	1,94	1,93	1,90	1,87
		Meningkatnya Pencapaian Keluarga Berencana dalam Pengendalian Penduduk	1. Persentase Pemakaian Konstrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR</i>)	81,71%	66,20%	66,60%	67,20%	67,56%	67,78%
			2. Persentase Putus Pemakaian Kontrasepsi (DO)	26%	25%	24%	23%	22%	21%
			3. Pendewasaan Usia Perkawinan	0,85%	0,84%	0,83%	0,81%	0,79%	0,76%
	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Seluruh Tingkatan Wilayah	CBR (<i>Crude Birth Rate</i>)	14,50	14,20	13,80	13,55	13,25	12,85	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	75,77	78,00	78,5	79	79,5	80
			2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	82,53	85	85,5	86	86,5	87
			3. Nilai Indeks Pofesional Pegawai (IPP)	75	78	78,5	79	79,5	80
			4. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)/Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			5. Persentase Serapan Anggaran	90,2	90,25	90,3	90,5	91	91,5

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, sedangkan Kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan, sasaran, yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan.

Rumusan Strategi berupa pernyataan perencanaan komprehensif yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian cara-cara dan arah kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis tersebut secara efektif dan efisien, yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai visi misi Kepala Daerah. Dalam hal ini strategi pembangunan daerah khususnya OPD merupakan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan bagi Pemerintah Daerah Strategi merupakan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah berdasarkan target kinerja capaian untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan tingkat kepuasan layanan kepada masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. Strategi Umum sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan

panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Gambar 5.1

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo sebagai Pijakan Penyusunan Strategi dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana



Sumber : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Lima Strategi Umum RPJMD tersebut di atas yang memiliki keterkaitan langsung dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Strategi 4 : Pembangunan Berpusat pada Manusia (*People Centered Development*).

Pemberdayaan Perempuan mempunyai makna yang strategis dalam membangun pengarusutamaan/kesetaraan gender diartikan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan karya dan karsa dalam bidang politik, ekonomi dan sosial seperti layaknya laki laki. Perlindungan anak dimaknai bahwa sebagai calon generasi penerus bangsa perlu dijauhkan dari cara berpikir yang sifatnya merusak dan diarahkan pada cara bersikap yang positif konstruktif sehingga dalam dirinya terpatri cita cita yang luhur untuk dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan Keluarga Berencana sebagai bentuk/pola membangun keluarga sejahtera lahir dan batin tanpa berkata bahwa tidak akan sejahtera kalau tidak berada/kaya dan juga salah satu cara pengendalian pertumbuhan penduduk.

Menyadari posisi Kabupaten Sidoarjo dalam konstelasi pembangunan nasional dan Jawa Timur, diperlukan strategi pembangunan yang tepat. Pemberdayaan perempuan salah satu unsur penting dalam membangun mendukung IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Sektor Pembangunan Manusia

merupakan sektor primer yang bersejajar dengan sektor strategis lainnya yaitu kesehatan yang didukung dengan sector primer lainnya yaitu pemberdayaan seluruh masyarakat utamanya perempuan di bidang politik ekonomi dan sosial. Sektor Strategis dan Sektor Primer ini perlu dikelola secara simultan berdampingan agar memiliki daya ungkit yang besar pada peningkatan Inkeks Pembangunan Manusia. Pada titik inilah, strategi ini menemukan relevansinya dengan Strategi yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026.

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan Misi ke 4 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 dengan sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat”, dan untuk mewujudkan Tujuan pada tingkat OPD yaitu (1) Mewujudkan pengarusutamaan gender yang berkeadilan; dan (2) Terwujudnya pengendalian penduduk melalui pengoptimalan pencapaian keluarga berencana.

Diagram 5.2

Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Strategi Umum 4 Dalam RPJMD :

Pembangunan Berpusat pada Manusia
(*People Centered Development*)

Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD

1. Penguatan komitmen secara afirmatif berupa pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah
2. Penguatan pemahaman dan kesadaran mengenai kesetaraan gender kepada masyarakat melalui KIE KG berbasis masyarakat

Strategi Renstra DP3AKB

1. Memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas perempuan melalui fasilitasi dan pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian dan taraf hidupnya
2. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana dan regulasi penting pendukung Kabupaten Layak Anak
3. Meningkatkan pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pengendalian kependudukan

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki 4 strategi yaitu:

- 1) Strategi 1 : Memperjuangkan kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian dan taraf hidupnya;
- 2) Strategi 2 : Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dan regulasi pendukung Kabupaten Layak Anak;
- 3) Strategi 3 : Meningkatkan Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 4) Strategi 4 : Meningkatkan peran serta masyarakat didalam pengendalian Kependudukan.

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Strategi 1 : Memperjuangkan kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian dan taraf hidupnya, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya perempuan melalui aktivitas fasilitasi/ pelatihan;
- b. Penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan/ kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak.

Strategi 2 : Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dan regulasi pendukung Kabupaten Layak Anak, dengan arah kebijakan sebagai berikut : Meningkatkan sarana dan prasarana serta memperkuat regulasi dalam rangka mendukung Kabupaten Layak Anak.

Strategi 3 : Meningkatkan Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan pemenuhan pelayanan KB;
- b. Penguatan Keluarga sejahtera sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk

Strategi 4 : Meningkatkan peran serta masyarakat didalam pengendalian Kependudukan, dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kajian dan informasi mengenai pengendalian kependudukan;
- b. Meningkatkan pemahaman banyak pihak, stakeholder dan masyarakat tentang Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Secara lebih rinci Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

Visi :			
Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo Yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Misi 1 :			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB	Mengoptimalkan kinerja pelayanan kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pelayanan publik yang Prima; 2. Mengembangkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan
Misi 4 :			
Membangun SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Meningkatkan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, serta Kebutuhan Dasar Lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pengarusutamaan/ Kesetaraan Gender yang Berkeadilan	Meningkatkan Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 2. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian dan taraf hidupnya 3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Kabupaten Layak Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya perempuan; 2. Penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan/ kesetaraan gender & pengarusutamaan hak anak; 3. Meningkatkan produk-produk regulasi menuju Kabupaten Layak Anak
Mewujudkan Pengendalian Penduduk Melalui Pengoptimalan Pencapaian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Pencapaian Keluarga Berencana dalam Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2. Meningkatkan Pengendalian Kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemenuhan pelayanan KB 2. Penguatan pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk

	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Seluruh Tingkatan Wilayah	Meningkatkan peran serta masyarakat didalam pengendalian kependudukan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kajian dan informasi mengenai pengendalian kependudukan;2. Meningkatkan pemahaman banyak pihak, stakeholder dan masyarakat tentang Pembangunan Berwawasan Kependudukan
--	--	---	--

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah membangun hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan sebagai bentuk upaya untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, maka dilaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.

Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penjabaran terkait dengan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo di sajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Mewujudkan Pengarusutamaan/ Kesetaraan Gender yang Berkeadilan	Meningkatkan Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak		PROGRAM PENGARUS-UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi, sosial	67,2	67,25	1.418.156.189	67,28	2.515.064.219	67,3	2.622.205.955	67,35	2.690.121.089	67,4	2.705.454.779	67,4	12.227.346.549	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pelebagaan Pengarus-utamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1). Jumlah instansi /Lembaga yang di bina/diberdayakan	260 Lembaga	260 Lembaga	270 Lembaga	686.242.908	280 Lembaga	706.830.195	290 Lembaga	728.035.101	300 Lembaga	749.876.154	300 Lembaga	3.732.371.645		
				2). Jumlah program /kegiatan yang dievaluasi PUG nya	30 Prog/Keg	48 Prog/Keg	60 Prog/Keg	686.242.908	75 Prog/Keg	706.830.195	85 Prog/Keg	728.035.101	90 Prog/Keg	749.876.154	100 Prog/Keg	3.732.371.645		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	1 Dokumen	607.000.000	1 Dokumen	637.350.000	1 Dokumen	669.217.500	1 Dokumen	702.678.375	1 Dokumen	2.616.245.875		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	48 Perangkat Daerah	266.300.000	48 Perangkat Daerah	279.615.000	48 Perangkat Daerah	293.595.750	48 Perangkat Daerah	308.275.538	48 Perangkat Daerah	1.147.786.288		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pd Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah perempuan dalam partisipasi bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi yang dibina	150 Orang	150 Orang	600,609,530	160 Orang	1,675,559,467	200 Orang	1,725,826,250	230 Orang	1,788,440,318	250 Orang	1,842,093,528	250 Orang	8,428,656,993	
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A		1 Dokumen	680,170,500	1 Dokumen	714,179,025	1 Dokumen	749,887,976	1 Dokumen	787,382,375	1 Dokumen	2,931,619,876	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A		25 Organisasi	241,890,500	25 Organisasi	253,985,025	25 Organisasi	266,684,276	25 Organisasi	280,018,490	25 Organisasi	1,042,578,291	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1). Jumlah lembaga perlindungan perempuan dan anak yang diadvokasi 2). Jumlah rekomendasi tindak lanjut peningkatan perlindungan perempuan dan anak	94 Lembaga	134 Lembaga	139,328,950	145 Lembaga	153,261,845	150 Lembaga	157,859,700	150 Lembaga	173,645,670	150 Lembaga	178,855,040	150 Lembaga	889,686,217	
				35 Rekom	24 Rekom	24 Rekom		24 Rekom		24 Rekom		24 Rekom						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				3). Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penguatan/pengembangan kelembagaan perlindungan perempuan	100 Orang	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	N/A	N/A		27 Lembaga		255,394,302								
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	N/A	N/A		210 Orang		61,930,000								
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	N/A	N/A		1 Dokumen		531,591,336								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah lembaga perlindungan perempuan dan anak yang diadvokasi dan dibina	190 Lembaga	210 Lembaga	964,999,909	215 Lembaga	993,949,906	220 Lembaga	1,023,768,403	225 Lembaga	1,054,481,456	230 Lembaga	270,000,000	210 Lembaga	5,902,506,398	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah rekomendasi tindak lanjut peningkatan perlindungan perempuan dan anak		35 Rekomendasi	24 Rekom	25 Rekom		26 Rekom		27 Rekom		28 Rekom		40 Rekom				
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,58	0,58	0,57		0,56		0,55		0,54		0,54				
			Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah lembaga perlindungan perempuan & anak yang melaksanakan kebijakan program dan kegiatan pencegahan thd perempuan dan anak	190 Lembaga	210 Lembaga	187,889,612	210 Lembaga	193,526,300	225 Lembaga	199,332,089	230 Lembaga	206,312,052	245 Lembaga	211,471,414	245 Lembaga	1,156,700,417	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	5 Dokumen	443,374,000	6 Dokumen	465,542,700	7 Dokumen	488,819,835	8 Dokumen	513,260,827	8 Dokumen	1,910,997,362	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A		210 Perangkat Daerah		225 Perangkat Daerah		230 Perangkat Daerah		245 Perangkat Daerah		245 Perangkat Daerah		
			Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab/Kota	Jumlah pengaduan kasus kekerasan Terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan	155 Laporan	160 Laporan	777,110,297	160 Laporan	800,423,606	160 Laporan	824,436,314	160 Laporan	849,169,404	160 Laporan	874,644,486	160 Laporan	4,902,894,403	
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Layanan Pengaduan	N/A	N/A		112 Orang	156,976,000	117 Orang	164,824,800	122 Orang	173,066,040	125 Orang	181,719,342	125 Orang	676,586,182	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A		6 Layanan	208,472,103	6 Layanan	218,895,708	6 Layanan	229,840,494	6 Layanan	241,332,518	6 Layanan	898,540,823	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	N/A	N/A		1 Laporan										
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A		1 Laporan										
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah kecamatan, desa/kelurahan menuju layak anak yang di advokasi dan dibina	84 Lembaga	371 Lembaga	1,077,705,850	371 Lembaga	1,421,770,100	371 Lembaga	1,421,770,100	371 Lembaga	1,458,593,946	371 Lembaga	1,529,398,209	371 Lembaga	7,233,548,663	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang diadvokasi dan dibina		320 Lembaga	320 Lembaga	320 Lembaga		320 Lembaga		320 Lembaga								
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang diadvokasi	N/A	N/A		320 Lembaga	1,208,199,000	320 Lembaga	1,268,608,950	320 Lembaga	1,332,039,398	320 Lembaga	1,398,641,367	320 Lembaga	5,207,488,715	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	N/A	N/A		320 Lembaga	1,208,199,000	320 Lembaga	1,268,608,950	320 Lembaga	1,332,039,398	320 Lembaga	1,398,641,367	320 Lembaga	5,207,488,715	
			Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang teradvokasi dan terfasilitasi	320 Lembaga	320 Lembaga	1,076,605,850	320 Lembaga	1,421,770,100	320 Lembaga	1,421,770,100	320 Lembaga	1,458,693,946	320 Lembaga	1,529,398,209	320 Lembaga	7,204,948,663	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A		1 Dokumen	375,000,000	1 Dokumen	393,750,000	1 Dokumen	413,437,500	1 Dokumen	434,109,375	1 Dokumen	1,616,296,875	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah lembaga perlindungan anak yang melaksanakan kebijakan program dan kegiatan pencegahan terhadap anak	303 Lembaga	303 Lembaga	195,821,500	201,696,145	303 Lembaga	209,763,991	303 Lembaga	218,154,550	303 Lembaga	224,699,187	303 Lembaga	1,050,135,373		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	-								
Mewujudkan Pengendalian Penduduk Melalui Pengoptimalan Pencapaian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya pencapaian Keluarga Berencana dalam pengendalian penduduk		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi modern (modern Contracepsi Prevalance Rate/ mCPR)	81,61	66,2	5,221,681,172	9,032,581,172	67,02	9,303,558,607	67,56	9,544,520,775	67,78	9,735,411,191	67,78	57,214,276,318	Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga	
			Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Droup out) /DO	26%	25%	24%			21%		20%		20%					
			Persentase UnMeet Need	7,47%	7,40	7,29			6,95		6,77		6,77					
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang diadvokasi	100 Mitra	100 Mitra	252,326,652	252,326,652	100 Mitra	264,942,985	150 Mitra	272,891,274	150 Mitra	281,078,012	150 Mitra	1,418,155,897		
			Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah sarana KIE yang tersedia dan didistribusikan	100 Unit	34 Unit			34 Unit		34 Unit		34 Unit					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Jumlah peserta yang hadir	200 Orang	200 Orang		200 Orang		200 Orang		200 Orang		200 Orang		200 Orang		
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	N/A	N/A		7 Organisasi	232,945,102									
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya	N/A	N/A		1 Dokumen	479,636,356									
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	N/A	N/A		3 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit	321,927,977	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	N/A	N/A		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2.722,447,355
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	N/A	N/A		18 Laporan		18 Laporan		18 Laporan		18 Laporan		18 Laporan		1,210,283,100
			Pengendalian Program KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP	N/A	N/A		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		1,210,283,100
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah penyuluh yang hadir	77 Orang	53 Orang	4,274,100,000	55 Orang		55 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		45,518,494,834
		Jumlah PPKBD yang dibina		349	349			349		349		349		349		349		
		Jumlah Sub PPKBD yang dibina		3910	4051			4051		4051		4051		4051		4051		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	N/A	N/A		53 Unit		55 Unit		55 Unit		60 Unit		60 Unit		130,828,750
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	N/A	N/A		4.400 Orang	8,427,000,000	4.400 Orang	8,848,350,000	4.400 Orang	9,290,767,500	4.400 Orang	9,755,305,875	4.400 Orang	36,321,423,375	
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta kegiatan	349 Orang	300 Orang		300 Orang	694,888,520	350 Orang	794,888,520	375 Orang	818,735,176	385 Orang	843,297,231	385 Orang	868,596,148	10,193,965,673
			Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	N/A	N/A		80 Orang		80 Orang	626,910,360	80 Orang	668,255,878	80 Orang	691,168,672	80 Orang	725,727,105	2,702,062,105

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	N/A	N/A		5.120 Orang	2.610.461,760	5.120 Orang	2.740.984,848	5.120 Orang	2.878.034,090	5.120 Orang	3.021.935,795	5.120 Orang	11.251.416,493	
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	N/A	N/A		1 Laporan	100.000,000	1 Laporan	105.000,000	1 Laporan	110.250,000	1 Laporan	115.762,500	1 Laporan	431.012,500	
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	N/A	N/A		1 Laporan	86.999,800	1 Laporan	91.349,790	1 Laporan	95.917,280	1 Laporan	100.713,143	1 Laporan	374.980,013	
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan & Kelompok Kegiatan	N/A	N/A		600 Orang	85.482,000	800 Orang	89.756,100	800 Orang	94.243,905	800 Orang	98.956,100	800 Orang	368.438,105	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan & Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah peserta kegiatan pembinaan kampung KB	84 Orang	84 Orang	14.322,719	84 Orang	14.322,719	84 Orang	14.752,401	84 Orang	15.194,973	84 Orang	15.650,822	84 Orang	88.566,352	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	N/A	N/A		42 Kampung	824,700,000	42 Kampung	865,935,000	42 Kampung	909,231,750	42 Kampung	954,693,338	42 Kampung	3,554,560,088	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan	0,35%	0,85%	585,613,480	0,83%	997,573,300	0,81%	1,040,069,923	0,79%	1,067,007,734	0,76%	1,073,089,678	0,76%	5,242,704,115	Bidang Berencana dan Ketahanan Keluarga
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilatih	300 Orang	500 Orang	495,522,920	500 Orang	510,388,608	500 Orang	525,700,266	500 Orang	541,471,274	500 Orang	557,715,412	500 Orang	3,059,298,479	Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga
			Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta Bina Keluarga yang dilatih	300 Orang	500 Orang		500 Orang	510,388,608	500 Orang	525,700,266	500 Orang	541,471,274	500 Orang	557,715,412	500 Orang		
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	N/A	N/A		1 Laporan	488,057,260	1 Laporan	512,460,123	1 Laporan	538,083,129	1 Laporan	564,987,286	1 Laporan	2,103,587,798	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp			
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	N/A	N/A		4.812 Orang		4.812 Orang		4.812 Orang		4.812 Orang		4.812 Orang		4.812 Orang		42.600.327,273
				Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah peserta ormas bina keluarga yang dilatih	200 Orang	500 Orang	90.090,560	550 Orang	487.184,692	575 Orang	575 Orang	575 Orang	580 Orang	515.374,266	580 Orang	580 Orang	2.183.405,636			
				Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	N/A	N/A		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		318.131,878

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	32,9	32,9	32,5	31,8	31,2	30,5	30,5						Bidang Pengendalian Penduduk	
				Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan	90%	100%	100%	100%	100%	100%								
				TFR (Angka Kelahiran Total)	2,02	1,95	1,94	1,93	1,90	1,87	1,87							
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kajian Analisa Dampak Isu-Isu Kependudukan yang difasilitasi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		Bidang Pengendalian Penduduk	
		Jumlah Lembaga Siaga Kependudukan yang difasilitasi		48 SSK	48 SSK	48 SSK	74 SSK	86 SSK	87									
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	N/A	N/A	1 Dokumen		Bidang Pengendalian Penduduk									
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	N/A	1 Dokumen		Bidang Pengendalian Penduduk									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
				Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	N/A	N/A		1 Dokumen	162,617,500	1 Dokumen	170,748,375	1 Dokumen	179,285,794	1 Dokumen	188,250,083	1 Dokumen	700,901,752	
				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	N/A	N/A		48 Satuan Pendidikan	192,567,500	48 Satuan Pendidikan	202,195,875	48 Satuan Pendidikan	212,305,669	48 Satuan Pendidikan	222,920,952	48 Satuan Pendidikan	829,989,996	
				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal & Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	N/A	N/A		1 Laporan	208,716,000	1 Laporan	219,151,800	1 Laporan	230,109,390	1 Laporan	241,614,860	1 Laporan	899,592,050	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	N/A	N/A		383 Organisasi	91,711,400	383 Organisasi	96,296,970	383 Organisasi	101,111,819	383 Organisasi	106,167,409	383 Organisasi	395,287,598	
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	N/A	N/A		1 Laporan	202,103,000	1 Laporan	212,208,150	1 Laporan	222,818,558	1 Laporan	233,959,485	1 Laporan	871,089,193	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Kependudukan yang terupdate	353	353	971,938,705	3 Dokumen	1,080,948,593	3 Dokumen	1,124,186,537	3 Dokumen	1,157,912,133	3 Dokumen	1,192,649,497	3 Dokumen	6,608,584,057	
		Jumlah Peserta Bintek/Sosialisasi Isu-Isu Kependudukan		42 Rumah Data				42 Rumah Data		42 Rumah Data		42 Rumah Data						
			Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	N/A	N/A		1 Laporan	80,730,000	1 Laporan	84,766,500	1 Laporan	89,004,825	1 Laporan	93,455,066	1 Laporan	347,956,066	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	N/A	1 Dokumen	.	1 Dokumen	178,058,800	1 Dokumen	186,959,640	1 Dokumen	196,307,622	1 Dokumen	206,123,003	1 Dokumen	767,447,065	
			Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	N/A	N/A	.	1 Dokumen	.	1 Dokumen	113,336,335	1 Dokumen	119,003,152	1 Dokumen	124,953,309	1 Dokumen	2,279,569,081	
			Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	N/A	3 Dokumen	.	3 Dokumen	528,887,000	3 Dokumen	555,331,350	3 Dokumen	583,097,918	3 Dokumen	612,252,813	3 Dokumen	2,279,569,081	
			Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	N/A	N/A	.	1 Dokumen	120,745,000	1 Dokumen	126,782,250	1 Dokumen	133,121,363	1 Dokumen	139,777,431	1 Dokumen	520,426,043	
			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	N/A	42 Unit	.	42 Unit	202,154,000	42 Unit	212,261,700	42 Unit	222,874,785	42 Unit	234,018,524	42 Unit	871,309,009	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	N/A	N/A		1 Laporan	168,394,850	1 Laporan	176,814,593	1 Laporan	185,655,322	1 Laporan	194,938,088	1 Laporan	725,802,863	
			Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	N/A	N/A		1 Dokumen										
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	N/A	N/A		1 Laporan	204,843,700	1 Laporan	215,085,885	1 Laporan	225,840,179	1 Laporan	237,132,188	1 Laporan	882,901,952	
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	N/A	N/A		1 Dokumen	248,090,000	1 Dokumen	260,494,500	1 Dokumen	273,519,225	1 Dokumen	287,195,186	1 Dokumen	1,069,298,911	
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	N/A	N/A		1 Laporan		1 Laporan	95,521,790	1 Laporan	100,297,880	1 Laporan	105,312,773	1 Laporan	301,132,443	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	90%	12,413,638,187	90%	13,004,769,296	90%	13,886,860,278	90%	14,531,004,207	90%	15,129,011,561	90%	80,102,165,258	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	90%	90%	27,750,000	90%	66,504,751	90%	68,499,894	90%	75,349,883	90%	82,884,871	90%	387,494,150	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	.	48 Orang	.	48 Orang	24,000,000	48 Orang	25,200,000	48 Orang	26,460,000	48 Orang	75,660,000	
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	N/A	N/A	.	48 Orang	164,775,000	48 Orang	173,013,750	48 Orang	181,664,438	48 Orang	190,747,659	48 Orang	710,200,847	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan	90%	90%	5,535,198,445	90%	5,585,198,445	90%	5,685,198,445	90%	6,253,718,290	90%	6,879,090,118	90%	35,109,981,346	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah anggaran Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	N/A	N/A	.	31 Orang	5,858,866,430	31 Orang	6,151,809,752	31 Orang	6,459,400,239	31 Orang	6,782,370,251	31 Orang	25,252,466,672	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	N/A	N/A		5 Dokumen	7,916,850	5 Dokumen	8,312,693	5 Dokumen	8,728,327	5 Dokumen	9,164,743	5 Dokumen	34,122,613	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	90%	679,610,814	90%	699,999,138	90%	769,999,052	90%	846,998,957	90%	931,698,853	90%	4,515,016,050	
			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik/ penerangan yang disediakan	N/A	N/A		6 Jenis	4,993,551	6 Jenis	5,243,229	6 Jenis	5,505,390	6 Jenis	5,780,659	6 Jenis	21,522,829	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	N/A	N/A		5 Paket	102,859,660	5 Paket	108,002,643	5 Paket	113,402,775	5 Paket	119,072,914	5 Paket	443,337,992	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	N/A	N/A		4 Jenis	-	4 Jenis	-							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	N/A		1 Paket	335,622,000	1 Paket	352,403,100	1 Paket	370,023,255	1 Paket	388,524,418	1 Paket	1,446,572,773	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	N/A		5 Paket	7,200,000	5 Paket	7,560,000	5 Paket	7,938,000	5 Paket	8,334,900	5 Paket	31,032,900	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	N/A		2 Dokumen	3,120,000	2 Dokumen	3,276,000	2 Dokumen	3,439,800	2 Dokumen	3,611,790	2 Dokumen	13,447,590	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	N/A		1 Laporan	18,680,000	1 Laporan	19,614,000	1 Laporan	20,594,700	1 Laporan	21,624,435	1 Laporan	80,513,135	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A		1 Laporan	400,000,000	1 Laporan	420,000,000	1 Laporan	441,000,000	1 Laporan	463,050,000	1 Laporan	1,724,050,000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	90%	90%	422,398,435	90%	422,398,435	90%	464,638,279	90%	511,102,106	90%	562,212,317	90%	2,509,349,572	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	N/A	N/A		1 Laporan	70,000,000	1 Laporan	77,000,000	1 Laporan	84,700,000	1 Laporan	93,170,000	1 Laporan	324,870,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	N/A	N/A		13 Unit		13 Unit		13 Unit		13 Unit		13 Unit		464,100,000
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	N/A	N/A		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		27,846,000
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	N/A	N/A		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		116,025,000
			Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnyayang dipelihara / direhabilitasi	N/A	N/A		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		986,212,500
			Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnyayang dipelihara / direhabilitasi	N/A	N/A		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		82,750,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	90%	90%	220,419,650	90%		90%		90%		90%		90%		1,360,427,123

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A		1 Unit		1 Unit	35,000,000	1 Unit	36,750,000	1 Unit	38,587,500	1 Unit	110,337,500	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	90%	90%	1,443,444,637	90%	1,443,444,637	90%	1,587,789,101	90%	1,746,568,011	90%	1,921,224,812	90%	9,488,292,266	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis penunjang jasa surat menyurat yang disediakan	N/A	N/A		1 Unit	500,000	1 Unit	550,000	1 Unit	605,000	1 Unit	665,500	1 Unit	2,320,500	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	N/A	N/A		1 Laporan	272,000,000	1 Laporan	299,200,000	1 Laporan	329,120,000	1 Laporan	362,032,000	1 Laporan	1,262,352,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	N/A	N/A		1 Laporan	58,500,000	1 Laporan	64,350,000	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	N/A	N/A		1 Laporan	1,769,645,200	1 Laporan	1,946,609,720	1 Laporan	2,141,270,692	1 Laporan	2,355,397,761	1 Laporan	8,212,923,373	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		
				Tersedianya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	630,148,160	7 Laporan	630,148,160	7 Laporan	693,162,976	7 Laporan	762,479,274	7 Laporan	838,727,201	7 Laporan	3,784,600,632	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A		4 Dokumen	313,065,929									
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	N/A		2 Dokumen	8,042,693									
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A	N/A		2 Dokumen	55,893,701									
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A		5 Laporan	64,651,875									

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana secara riil dan benar secara manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat.

Seperti yang telah diuraikan pada Bab 4 bahwa sinergi dan sinkronisasi, keselarasan antara RPJMD dengan Renstra diawali pada saat menetapkan Tujuan Renstra secara sunstansi adalah Sasaran RPJMD, karena pada dasarnya tercapainya Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD karena support dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan PD, karena penganggaran/pendanaan berada pada Program, Kegiatan/Sub Kegiatan pada DPA PD yang telah ditetapkan. Secara rinci, penetapan indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang mengacu pada RPJMD, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,65	94,65	94,53	94,95	95,37	95,77	96,25	96,25
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,20	67,20	67,20	67,25	67,30	67,35	67,40	67,40
	Persentase Kasus Kekerasan dan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,02	2,08	1,95	1,94	1,93	1,90	1,87	1,87
	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR</i>)	81,71%	81,71%	66,20%	66,60%	67,20%	67,56%	67,78%	67,78%
	Persentase Putus Pemakaian Kontrasepsi (DO)	26%	26%	25%	24%	23%	22%	21%	21%
	Pendewasaan Usia Perkawinan	0,85%	0,85%	0,85%	0,83%	0,81%	0,79%	0,76%	0,76%
	CBR (<i>Crude Birth Rate</i>)	14,50	14,50	14,20	13,80	13,55	13,25	12,85	12,85
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	75,77	75,77	78,00	78,5	79	79,5	80	80
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	82,53	82,53	85	85,5	86	86,5	87	87
	Nilai Indeks Profesional Pegawai (IPP)	75	75	78	78,5	79	79,5	80	80
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)/Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Persentase Serapan Anggaran	90,2	90,2	90	90,2	90,5	91	91,5	91,5

Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 meliputi empat aspek sebagai berikut :

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengampu Sasaran Misi 4 dalam RPJMD Sidoarjo tahun 2021-2026 yaitu: "Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui meningkatkan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya"

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah diselaraskan dengan Strategi dan Arak Kebijakan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidaorjo Tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII.

BAB 8 PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun untuk periode lima tahun dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021–2026. Perubahan Rencana Srategis ini disusun, selain sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan *stakeholders* untuk merumuskan program tahunan, juga sebagai acuan dalam perumusan, pelaksanaan kegiatan penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta evaluasi terhadap pelaksanaannya di Kabupaten Sidoarjo selama periode Tahun 2021–2026 agar terpadu dan terfokus sesuai tugas dan fungsi PD yang ada.

Urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana memiliki permasalahan yang sangat kompleks. Langkah pertama dalam upaya mengatasi berbagai tantangan tersebut adalah perlu dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo dengan baik. Tahap kedua, perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, perangkat daerah lintas sektor, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha, sehingga rencana program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Melalui perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat serta dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, juga didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu mengemban tugas bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Hal penting yang perlu digaris bawahi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yaitu : (1) Sosialisasi tentang pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender perlu dioptimalkan melalui lembaga masyarakat tingkat terbawah (Kelurahan dan Desa) serta lembaga pendidikan; (2) Penguatan terhadap Kebijakan tentang Gender perlu dibuat dan atau disempurnakan sebagai pijakan PD dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan aktivitas yang berhubungan dengan gender; (3) Kasus kekerasan dan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak menjadi prioritas penyelesaiannya, sehingga secara persentase semakin berkurang; (4) Pemenuhan hak-hak anak yang menjadi kewajiban pemerintah dan para piha terkait sebaiknya perlu dioptimalkan sehingga langkah langkah menjadikan Kabupaten Layak anak pada parameter tertinggi; (5) Sosialisasi KB terus tiada henti sehingga KB sebagai upaya menjadikan keluarga sejahtera dan tangguh di masyarakat; (6) Optimalisasi dan meningkatkan PUS sebagai peserta KB aktif; dan (7) Pembangunan Daerah berwawasan kependudukan perlu disosialisasikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah, desa dan para stakeholder terkait, apabila perlu dipertegas melalui Regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam menyusun rencana, melaksanakan dan menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Sidoarjo agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dan *Stakeholders*”, tiga pilar ini merupakan spirit yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan stakeholders terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan. Semoga Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo yang telah disusun ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, Maret 2022
Kepala Dinas P3AKB
Kabupaten Sidoarjo

AINUN AMALIA, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 197505131993112001